

**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA RIWANG DALAM MENDUKUNG FALAH
BERBASIS KESETARAAN GENDER**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA RIWANG DALAM MENDUKUNG FALAH
BERBASIS KESETARAAN GENDER**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Lasmi
NIM : 1904010027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Palopo, 11 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METAL
TEMPEL
E652AKX677786226

Nurul Lasmi

NIM.19 0401 0027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender yang ditulis oleh Nurul Lismi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904010027 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 20 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 26 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Ketua Sidang | (<i>Anita</i>) |
| 2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I | Sekretaris Sidang | (<i>Alwi</i>) |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Penguji I | (<i>Fasiha</i>) |
| 4. Rismayanti, S.E., M.Si | Penguji II | (<i>Rismayanti</i>) |
| 5. Nur Amal Mas, S.E., Sy., M.E | Pembimbing | (<i>Nur Amal Mas</i>) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Syariah



Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
NIP. 19820124 200901 2 006



Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I
NIP. 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang Dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah berjuang dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Ramli dan Ibu Suarni yang telah melahirkan, membesarkan penulis serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya mengalir di

setiap langkah sehingga penulis dapat menuntut ilmu sampai saat ini, serta dukungan baik berupa moral maupun materi hingga penulis mampu bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini, sungguh penulis sadari bahwa penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT dan semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua penulis.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Almh. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Periode 2015-2022 yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,, Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palopo Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., beserta para dosen, staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah dan telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E., selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. dan Rismayanti, S.E., M.Si. selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan nasehat serta bimbingan selama saya berkuliah di kampus IAIN Palopo.
8. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Karsing, S.Ap., selaku Kepala Desa Riwang yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
11. Nurwaliah selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Ayahanda Drs. Muhammad Ishak selaku badan penyantun PKK di Desa Riwang serta masyarakat Desa Riwang yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
12. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kakak dan adik serta keluarga tercinta penulis yang selama ini banyak membantu, memberikan dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKS E), yang selama ini membantu dan selalu saling memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
14. Keluarga besar HMPS Ekonomi Syariah IAIN Palopo terkhusus teman seperjuangan saya Achmad Fawzy Hasan, Nurul Kirana, Gusti Rahmayani DM, Delia Ardalita, Rika Arditha, Nurul Hidayatul Hikmah, Urwatunnisa, Muh. Yusril Izha Mahendra dan Yudi Setiawan yang sudah berjuang sama-sama hingga masa kepengurusan berakhir dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan dan doa.

15. Kepada DMT, sahabat penulis sejak duduk di bangku SMP hingga sekarang yaitu Andi Mayang Sari, Ririn Wulandari, Sri Wahyuni Nur, Dhea Adhelia, Anita A.S, Farah Istiqama Muhammad, Ermitha Lestari, Gabriela Natasya, Musdalifah, Cindy Mardiana Putri, Ismi Sari serta Alya Nadila Aswin. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang dan selalu memberikan semangat, doa, dan waktu kepada penulis hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
16. Kepada sahabat penulis selanjutnya sejak SMA, Auliyah Ramadani, Nurul Fadilah, Gusti Rahmayani DM, dan Luthfiah Mahira A, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini dan membantu penulis dalam penyelesaian studi.
17. Kepada teman-teman KKN-MB Angkatan XLII Kecamatan Larompong terkhusus posko Desa Riwang yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Teriring doa, segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. Aamiinn Allahumma Aamiinn.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta benilai ibadah di sisi-Nya. Aamiinn Allahumma Aamiinn.

Palopo, 23 Juli 2023

Nurul Lasmi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I

وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas hurufa, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Tbārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR = Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR AYAT	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
ABSTRAK	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi teori	13
1. Konsep Peran	13
2. Kesejahteraan dalam Islam	14
3. Teori Kesejahteraan	17
4. Konsep kesetaraan gender.....	24
C. Kerangka pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Instrumen Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Definisi Istilah.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
C. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	54
D. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:168	15
Kutipan ayat 2 QS An-Nahl/16:167	27



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	x
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xiii
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xiii
Tabel 3.1 Pedoman Observasi.....	33
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	34
Tabel 3.3 Langkah-langkah Analisis Data	37
Tabel 4.1 Daftar Kepengurusan PKK Desa Riwang.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PKK Desa Riwang	54
Gambar 4.2 10 Program PKK	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 SK Penguji

Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 8 Persetujuan Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Penguji

Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah

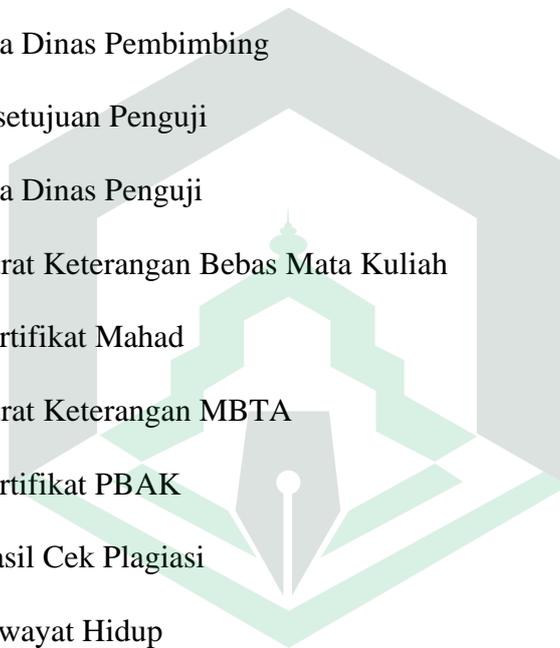
Lampiran 11 Sertifikat Mahad

Lampiran 12 Surat Keterangan MBTA

Lampiran 13 Sertifikat PBAK

Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 15 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nurul Lasmi, 2023, *“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang Dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender.* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nur Amal Mas,S.E.,Sy.,M.E.

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang Dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian yaitu tingginya angka kelahiran penduduk yang besar di Indonesia yang belum diimbangi dengan kualitas SDM, untuk itu PBB menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk memberdayakan kaum perempuan. Karena hal tersebut, pemerintah membentuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memberdayakan kaum perempuan dan membantu pemerintah dalam pembangunan. Namun di Desa Riwang tidak sedikit perempuan yang mempunyai kesadaran terkait hal tersebut sehingga tidak ikut serta didalam kegiatan PKK. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat PKK dalam menjalankan program kerjanya dan untuk mengetahui peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis kesetaraan gender di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis kesetaraan gender di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu memiliki peran yang positif dengan adanya beberapa kegiatan dan manfaat yang diberikan oleh PKK sendiri yaitu dari segi pendapatan dan konsumsi keluarga dimana adanya kegiatan keterampilan yang dimana hasilnya dapat menambah penghasilan keluarga, dari segi fasilitas tempat tinggal yang dimana pemerintah bekerja sama dengan PKK memberikan jamban bagi masyarakat yang membutuhkan, dari segi kesehatan dengan memberikan sosialisasi pendekatan STBM dan dari segi pendidikan mengadakan program “massikola sule”.

Kata kunci: Gender,Kesejahteraan,Pemberdayaan

ABSTRAK

Nurul Lasmi, 2023, The Role of Empowering Family Welfare in Riwang Village in Supporting Gender Equality-Based Falaah. Thesis for the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

This study discusses the Role of Family Welfare Empowerment in Supporting Community Welfare Based on Gender Equality). The problem contained in the research is the high birth rate of a large population in Indonesia which has not been matched by the quality of human resources, for this reason the United Nations has established gender equality as one of the goals of sustainable development or SDGs to empower women. Because of this, the government formed the Family Welfare Empowerment (PKK) to empower women and assist the government in development. However, in Riwang Village there are not a few women who are aware of this, so they do not participate in PKK activities. From these problems, this study aims to determine the supporting and inhibiting factors of the PKK in carrying out its work program and to determine the role of the PKK in supporting social welfare based on gender equality in Riwang Village, Larompong District, Luwu Regency.

This research is a research that uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through direct observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with the validity of the data through source, technique, and time triangulation techniques.

The results showed that the role of Family Welfare Empowerment (PKK) in supporting community welfare based on gender equality in Riwang Village, Larompong District, Luwu Regency had a positive role with several activities and benefits provided by the PKK itself, namely in terms of family income and consumption where there were activities skills where the results can increase family income, in terms of housing facilities where the government works together with the PKK to provide latrines for people in need, from a health perspective by providing socialization on the STBM approach and from an educational perspective holding programs “massikola sule”.

Keywords: Empowerment, Gender, Welfare

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang diperhadapkan dengan angka kelahiran penduduk yang tinggi. Jika dilihat dari urutannya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa.¹ Namun peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan juga tidak serta merta hanya dapat dilihat dari seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Namun juga mencakup aspek yang lebih esensial seperti halnya ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut, membuat Negara Indonesia memiliki banyak persoalan rumit yang terjadi di masyarakat.² Negara Indonesia berusaha untuk terus melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan di segala sektor. Pembangunan ini dilaksanakan untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

¹“Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023”, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

²JMK, “Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Bertambahnya Angka Jumlah Penduduk yang Diakibatkan Meledaknya Angka Kelahiran,”(07 Februari 2023) <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/laju-pertumbuhan-penduduk-merupakan-bertambahnya-angka-jumlah-penduduk-yang-diakibatkan-oleh-meledaknya-angka-kelahiran>

Meningkatnya populasi penduduk di Indonesia berakibat pada tingginya angka kelahiran. Apabila angka kelahiran tidak terkendali maka jumlah penduduk akan semakin besar. Jumlah penduduk menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena semakin banyak penduduk suatu negara, maka semakin tinggi pula tuntutan negara tersebut untuk meningkatkan SDM. Namun faktanya, jumlah penduduk yang besar di Indonesia belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Sedangkan peningkatan kualitas hidup perlu mendapatkan perhatian besar, sebab hal ini berperan penting dalam percepatan pencapaian berbagai target dari SDGs.³ Karena adanya hal tersebut, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan.⁴ Berbagai target SDGs ditujukan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal, termasuk perempuan.⁵

Kesetaraan gender telah lama diperjuangkan oleh pejuang feminis diberbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari problematika kaum perempuan sendiri, dimana adanya anggapan bahwa perempuan kurang atau bahkan tidak dapat memainkan peran independen dalam tataran domestik publik. Posisi perempuan selalu dikaitkan dengan lingkungan

³ Risa Ruri Indraswari, Risni Julaeni Yuhan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Kelahiran Pertama di Wilayah Pedesaan Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 12, No. 1 (Juni 2017):2,

https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/274/pdf_1

⁴ Faturrahman Alputra Sudirman, Fera Try Susilawati, "Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Publicuho* Vol. 5 No. 4 (Januari 2022):996, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>.

⁵ Isti Larasati Widiastuty "Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup di Jawa Barat" *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 14 No. 2 (Desember 2019):3 <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/377/pdf>.

yang berhubungan dengan urusan keluarga dan rumah tangga, sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik yang berhubungan dengan urusan diluar rumah. Dalam posisi seperti ini, maka perempuan sulit mengimbangi posisi laki-laki.⁶

Pada dasarnya, Islam memberi hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, dengan kata lain Islam sangat menegaskan kualitas perempuan dan laki-laki sepanjang itu selaras dengan kodrat dan fitrahnya masing-masing. Dengan demikian tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengembangkan diri, baik sebagai individu, perempuan, ibu rumah tangga, maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya dalam hal ini harus dijaga keharmonisan antara pengembangan diri dengan posisi dimana ia berada.

Salah satu wadah yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mewujudkan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara yaitu dengan membentuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai sarana.⁷ Dengan adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menjadi organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan menjadi tujuan utama dari PKK, hal ini dikarenakan keluarga

⁶ Elsa Purwaningsih, "Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah, (2021):7. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19248-Full_Text.pdf.

⁷"Perwujudan Kesetaraan Gender Melalui Gerakan PKK", 23 Februari 2016. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/287/perwujudan-kesetaraan-gender-melalui-gerakan-pkk>

merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibuat untuk mengikutsertakan perempuan dalam program pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak lewat program kerja yang dilaksanakan. Prioritas dari kegiatan PKK yaitu untuk memajukan pembentukan feminisme yang lebih banyak berkaitan dengan cara hidup yang lebih baik dengan upaya membuat ibu rumah tangga sebagai penjaga rumah tangganya yang cerdas, kreatif dan inovatif demi mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.⁸

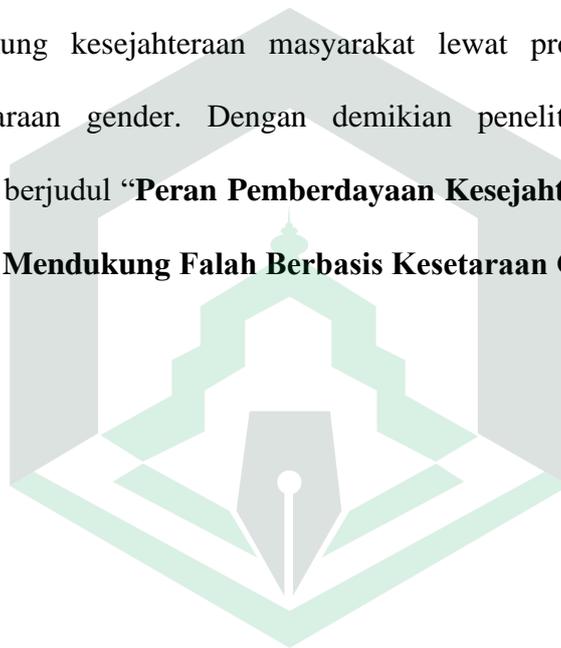
Keterkaitan perempuan dengan PKK ialah mengenai bagaimana perempuan itu dapat aktif untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan di PKK sehingga eksistensi perempuan diakui oleh semua pihak.⁹ Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang memiliki program kerja yang sejalan dengan program pemerintah yaitu memberdayakan perempuan demi menurunnya angka kelahiran dan mencapai kesejahteraan. Namun berdasarkan informasi yang didapatkan dari ketua tim penggerak PKK di desa tersebut pada saat melakukan pra observasi, perkembangan PKK di Desa Riwang masih memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran

⁸ Dina Debora Sibarani, "Analisis Program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga dalam Upaya Meningkatkan Sosial Ekonomi Keluarga Prasejahtera di Desa Gasaribu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba ,"(2022) 3
<http://digilib.unimed.ac.id/49188/1/1.%20NIM.%203182131009%20COVER.pdf>

⁹ jenoardi Meleru, Fanley Pangeman, dan Stefanus Sampe, "Efektivitas PKK Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe," *jurnal Governance* Vol 2, No.1 (2022): 3,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/38956/35395>

masyarakat akan arti pentingnya pemberdayaan di masyarakat khususnya perempuan. Oleh karena itu tidak sedikit perempuan di desa tersebut yang tidak ikut bergabung bahkan ada yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suaminya untuk mengikuti kegiatan dengan alasan tidak mendapatkan keuntungan dan hanya membuang waktu.

Dari uraian permasalahan tersebut, maka penulis merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti dengan melihat sejauh mana peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lewat program kerjanya yang berbasis kesetaraan gender. Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender”**.



B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam, maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa Riwang dalam mendukung Falah berbasis kesetaraan gender. Penulis melihat peranan PKK Desa Riwang dalam mendukung falah menggunakan indikator kesejahteraan berdasarkan BPS dan mengambil empat indikator yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, fasilitas tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dan mengaitkan dengan konsep falah serta hanya mendeskripsikan tujuh dari sepuluh program kerja dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, dan perencanaan sehat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang dalam menjalankan program kerja?
2. Bagaimana peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa Riwang dalam mendukung falah berbasis kesetaraan gender?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang dalam menjalankan program kerja
2. Untuk mengetahui peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa Riwang dalam mendukung falah berbasis kesetaraan gender

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta menambah pengalaman bagi penulis, juga sebagai salah satu saran berfikir untuk bahan pembelajaran dan berlatih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsi pengetahuan masyarakat serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran

dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Riwang berdasarkan kesetaraan gender.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah acuan bagi peneliti yang digunakan untuk mencari perbandingan dan mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang relevan ini berisi tentang penelitian orang lain yang dijadikan sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Disamping itu, penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis teliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Setianingsi, Nastia dan Muhammad Askal dalam penelitian yang berjudul **"Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi"**. Penelitian ini bertujuan untuk partisipasi perempuan terhadap program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.¹⁰

¹⁰ Eka Setianingsi, Nastia dan Muhammad Askal, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi", *Journal of Government Science Studies* Vol.1 No.2 (Oktober 2022):3, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jgs/article/view/5924/4783>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam program PKK primer berjalan cukup baik, karena pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi melalui keterlibatan dalam acara yang dilakukan oleh tim penggerak PKK di Kelurahan Wandoka Utara. Selanjutnya pelibatan masyarakat dalam program utama PKK dapat dianggap sebagai swadaya masyarakat, baik dari segi tenaga kerja maupun perbekalan.

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian tersebut yaitu melibatkan PKK dalam mengkaji suatu fenomena didalamnya namun perbedaannya yaitu pada penulis lebih terfokus kepada kesejahteraan masyarakat yang berbasis kesetaraan gender lewat PKK sedangkan pada penelitian terdahulu ini memfokuskan pada partisipasi perempuan dalam PKK sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih dan Fita Nurotul Faizah meneliti tentang **“Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam)”** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah terkait relevansi kesetaraan gender dan status perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender memberikan polemik dalam kehidupan manusia, terutama bagi kaum perempuan. Gender yang terbentuk karena lingkungan sosial tersebut memberikan diskriminasi terhadap

ruang gerak perempuan yang terbatas pada ruang domestik rumah tangga, dan tidak memberikan kebebasan perempuan di ruang publik. Hal ini secara tegas dibantah oleh syari'at Islam yang menyatakan bahwa perempuan bekerja dalam ranah publik diperbolehkan. Islam tidak mengkotak-kotakan peran antara laki-laki dan perempuan. Malah, Islam memberikan hak secara bebas untuk manusia berkarya dan bekerjasama dalam "amar ma'ruf nahi munkar". Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adanya legitimasi kesetaraan gender tersebut, maka status dan peran perempuan bekerja di sektor publik dapat diakui. Perempuan dapat secara nyata memberikan kontribusi dalam perekonomian keluarga, sehingga akan didapati 2 (dua) sumber pendapatan, yaitu pendapatan perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Dengan begitu, sektor perekonomian keluarga secara cepat akan terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik material (keuangan) maupun non material.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah melibatkan perempuan yang berperan dalam menyejahterahkan masyarakat dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian dimana subjek penelitian ini lebih terfokus kepada organisasi PKK sedangkan penelitian terdahulu tersebut terfokus pada perempuan yang bekerja.

¹¹ Putri Dyah Ayu Fitriyaningsih dan Fita Nurotul Faizah, "Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam),"(2021), <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/703>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Surjani yang meneliti terkait **“Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”**.¹² Penelitian ini bertujuan untuk membangun kebersamaan atau menjalin kerjasama PKK dalam memberikan motivasi untuk masyarakat Desa dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam membuka peluang bisnis. Jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Ussu adalah dengan meningkatkan kreatifitas pemanfaatan sampah maupun pengolahan makanan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam pemanfaatan SDA, meningkatkan bidang keagamaan, juga PKK sebagai promotor masyarakat dan sebagai pendidik.

Adapun persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian ini dimana persamaanya sama-sama mengambil perspektif kesetaraan gender dalam penelitiannya sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada salah satu organisasi di Desa Riwang yaitu PKK dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berdasarkan kesetaraan gender melalui sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas terkait peranan PKK dalam meningkatkan kualitas hidup di Desa yang berbeda.

¹²Surjani, “Peran PKK dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”, *Skripsi IAIN Palopo* (2020), Perpustakaan IAIN Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Peran

Menurut Margono Slamet peran “mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial.” Sedangkan menurut Gross Manson dan Mc Earchen berpendapat bahwa peran adalah “sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.

Pengertian peranan di atas dikaji oleh Soerjono Soekanto menurutnya peranan adalah “aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran”. Menurut Soerjono Soekanto peranan tersebut menurutnya mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

¹³I Ketut Susana, Et.al, “Peran Kelompok Ibu PKK di Bidang Kebudayaan Dalam Rangka Memanfaatkan Potensi Kebudayaan Daerah di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Matara Lampung Tengah”. *Jurnal Penelitian*, h.5. <https://www.neliti.com/id/publications/248670/peranan-pkk-dalam-memanfaatkan-potensi-kebudayaan-daerah-di-desa-wirata-agung-la>.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁴

Sesuai dengan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat harapan-harapan yang mencakup tindakan atau perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang yang diberikan kedudukan dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus sesuai dengan peranannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan diharapkan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh

¹⁴ Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1999), hlm. 735

Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁵

Sejahtera dalam Islam berarti juga tercukupilah kebutuhan manusia dalam kesehariannya, akan tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut harus seimbang dan berlandaskan syariat Islam seperti yang tercermin dalam Q.S.Al-Baqarah (2):168 Allah SWT berfirman:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(QS.Al-Baqarah (2):168)

Dalam ini Tuhan memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, serta mencegah kita mengikuti langkah-langkah setan yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan (kemaksiatan) dan permusuhan. Tuhan menjelaskan, sebab timbulnya kefanatikan dalam kebatilan dan kesesatan adalah: berpegang teguh kepada apa yang telah dibiasakan oleh orang-orang tua tanpa meninjau kembali tentang kebenarannya.¹⁷

¹⁵ Ahmad Majdi, Tsabit, ” Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Zakat,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019):7 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/920>

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hufaz* (Bandung, 2018).

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ASH Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995).

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memang harus diakui bahwa konsep al-falah dan kebahagiaan bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami dan diukur. Akan tetapi seluruh ilmuan sepakat bahwa tujuan semua amal manusia baik di tingkat pribadi atau masyarakat adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan dan kebahagiaan adalah aspek penting dalam kemajuan individu dan masyarakat. Itulah kebahagiaan yang dicita-citakan di dunia dan akhirat.¹⁸

Al-falah menuntut seorang muslim untuk berorientasi pada masalah dalam setiap aktivitasnya. Jika seseorang menggunakan ukuran masalah dalam aktivitas ekonominya baik dalam kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi, maka diharapkan ia akan mencapai *alfalah* yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Sebab, seperti yang telah dikemukakan di awal tentang epistemologi al-falah dalam Islam, istilah al-falah diambil dari kata-kata Al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga

¹⁸ Al-Nawawi. Syarh Shahih Muslim. Vol VII. Mesir: Mu'assasah Qarthubah. 1926. hal. 145. 31 H

tidak hanya memandang aspek material, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.¹⁹

Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang kedua fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

¹⁹ Ahmad Majidi, Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019):6 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/920>

negara yang ketiga negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.²⁰

Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²¹

a. Prinsip dan faktor kesejahteraan

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan

²⁰ Abd. Kadir Arno, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan)," *Jurnal of Islamic Management and Business* 1, No. 1 (2018):45

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/views/451>

²¹ Ahmad Majdi, Tsabit, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019):2 <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/920>

manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.²²

b. Indikator kesejahteraan

Menurut BPS, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan adalah konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

1. Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

a. Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp. 5.000.000,-.

b. Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

²² Prasetyaningtyas Pita, "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan di Kecamatan Pacitan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* VOL 6, no. 1 (2018):3
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4330/3819>

c. Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar $< \text{Rp. } 1.000.000$.

2. Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).

b. Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).

c. Non Permaen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya

dari daundaunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012).

3. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

b. Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

c. Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

4. Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

a. Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

b. Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

c. Kurang

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai prosentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

b. Cukup

Golongan ini berarti apabila 5 item dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item

dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

c. Sulit

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.

6. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

b. Cukup

Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

c. Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.

7. Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.

Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

a. Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.

b. Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.

c. Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.²³

4. Konsep Kesetaraan Gender

Gender merupakan istilah digunakan untuk membedakan status laki-laki dan perempuan pada sistem sosial masyarakat, status tersebut dibentuk oleh konsep sosial, budaya dan kultur, konsep tersebut merupakan hasil cipta pemikiran masyarakat sehingga menjadi sebuah sistem yang mereka jalankan tetapi konsep tersebut dapat diubah oleh masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya gender bukanlah hasil konstruksi biologis yang tidak dapat diubah.

²³ Prasetyaningtyas Pita, "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan di Kecamatan Pacitan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* VOL 6, no. 1 (2018):3
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4330/3819>

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Namun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu gender tidak identik dengan jenis kelamin dan yang kedua gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.²⁴ Sistem gender akan terus mengalami perubahan seiring perubahan pola interaksi masyarakat, dengan demikian pola interaksi tersebut menghasilkan sistem yang merombak struktur sosial tanpa terkecuali terlebih peran laki-laki dan perempuan, tetapi proses berjalannya sistem tersebut diharapkan dapat melahirkan kesetaraan gender meskipun terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Tuntutan zaman yang memberikan peluang haruslah digunakan perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Bukankah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Ayat pertama yang turun adalah "iqra'" yang berarti bacalah, ini menjelaskan bahwa dalam keseharian setiap umat, baik perempuan ataupun laki-laki, harus dapat membaca situasi yang ada. Keadaan ekonomi keluarga, kesejahteraan masyarakat luas dan keahlian diri yang bermanfaat bagi orang lain haruslah terus dikembangkan sesuai dengan ajaran bahwa "khairun naasi anfa'uhum lin naas".²⁵

²⁴ Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya*. (Jawa Tengah, CV Pena Persada, 2020), 13.

²⁵ Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 51

Untuk menentukan bahwa suatu daerah dikatakan terbebas dari ketidakadilan gender maka ada beberapa hal yang harus dilihat dari faktor kesenjangan gender yaitu:

1. Akses, dimana pemerintah memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya.
2. Partisipasi, dimana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol, dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan control,
4. Serta dapat memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.²⁶

Pemerintah sebagai konstitusi tertinggi sebuah negara membantu jalannya tujuan kesetaraan gender dalam upaya melindungi dan menangani tindak kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²⁷ Sistem gender yang memarjinalkan salah satu pihak tidak dapat terus menerus dilanggengkan karena dapat membuat perempuan semakin termarjinalkan dari sistem sosial karena ada semacam stereotip (pelabelan) terhadap perempuan yaitu lemah lembut hanya mampu mengurus urusan rumah tangga sehingga tidak memiliki tempat pada sistem sosial oleh karena penempatan mereka selalu pada posisi tidak penting sehingga tidak mampu tampil bahkan dalam keluarga, mereka tidak berhak mengambil keputusan karena yang berhak mengambil keputusan hanyalah laki-laki pada dasarnya

²⁶Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah Tahun 2019

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020

prioritas dalam keluarga hanya mementingkan kepentingan laki-laki saja, perbedaan ini merefleksikan sistem patriarki yang menciptakan sistem sosial yang menantang dimana perempuan seringkali mendapati mereka berada pada posisi subordinasi.²⁸

Kesetaraan gender tercipta ketika laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai kesamaan kondisi dan posisi untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya agar mampu berperan dan berpartisipasi.²⁹Oleh karena itu analisis tersebut diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender di tengah kebijakan yang berbeda dalam memandang peran laki-laki dan perempuan atas kebijakan yang responsif.sesuai situasi, kondisi dan dukungan yang terjadi. Cropanzano dan Mitchell menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat dikaji dari bentuk dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informatif dan dukungan penilaian³⁰.Oleh karena itu untuk mendorong perempuan ke arah berkemajuan perlulah ada transformasi sosial tanpa meninggalkan hak dan kewajiban.

Islam sangat memuliakan seorang perempuan. Bahkan hal tersebut bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. yang menerangkan bahwa peran dan kedudukan seorang perempuan dalam Islam begitu tinggi. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mendapat imbalan yang sama pula. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nahl (16):97

²⁸ Yanuarius You, *Gender Feminisme dan Fungsionalisme Struktural*, Yogyakarta: Nusamedia, (2021), h. 12.

²⁹ Sri Hartanti, *Gender dalam Birokrasi Pemerintahan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, (2020), h. 57

³⁰ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: Ub Press (2017), h. 51.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya : Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³¹

Ayat di atas merupakan janji Allah SWT. bagi siapapun yang beriman serta beramal saleh, bahwa ia akan mendapat karunia dari-Nya berupa hidup bahagia. Dalam segmentasi lain, Allah juga menegaskan stigma hidup bahagia (tidak merugi) adalah hidup yang berdasar keimanan dan amal saleh.³²

Gambaran pendidikan merupakan fenomena menarik yang dapat merubah status perempuan akan tetapi peran perempuan mengalami pergeseran yang cukup pesat karena perempuan sudah menduduki berbagai macam sektor tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai perempuan yang memiliki peran domestik dan publik. Maka fenomena gender memberikan perempuan peran ganda karena pembagian kerja merupakan suatu keharusan. Ide peran ganda perempuan pada dasarnya berasal dari pandangan dunia yang sama, untuk lebih spesifik kualifikasi antara ruang rumah dan ruang publik. Ide pekerjaan ganda yang awalnya diharapkan memungkinkan perempuan, mendidik anak dan mengurus rumah tangga dalam ranah domestik sedangkan dalam rana publik perempuan sudah berperan berbagai macam sektor yaitu pertanian, pendidikan hingga

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hufaz* (Bnadung, 2018).

³² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim (Jilid 2)*, Edisi 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)

pemerintahan. Pembagian tugas domestik yang terjadi dalam keluarga secara merata merupakan salah satu implikasi dari terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga.³³

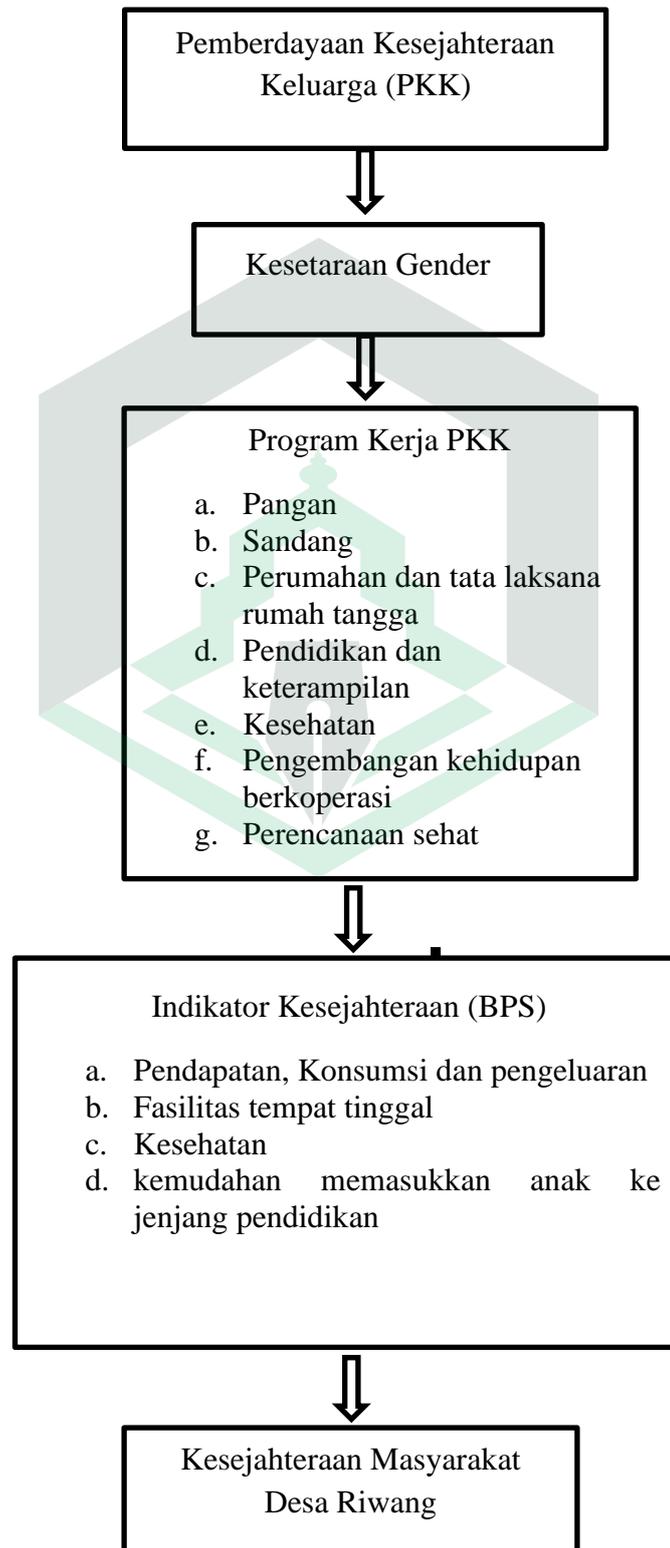
Gagasan kesetaraan gender merupakan gagasan memanusiakan perempuan yang tidak dikucilkan pada tatanan sosial karena potensi untuk mencapai kecemerlangan yang paling tinggi. Oleh karena itu, dalam mengerjakan pekerjaan perempuan, perempuan harus dipandang sebagai subjek yang memiliki kemauan, kebaikan, dan kecerdasan dari dalam dirinya. Menurut Gheaus, laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapat perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti ia korban ketidakadilan gender. Sebagai gambaran bahwa ketidakadilan gender terjadi jika orang bertindak tidak adil karena kebencian atau prasangka buruk terhadap perempuan, sehingga perempuan menjadi korban ketidakadilan hanya karena mereka perempuan. Dominasi patriarki yang tidak seimbang, tidak proporsional, atau mulai lepas dari fungsi utama hierarki struktur sosial cenderung menimbulkan ketidakadilan gender, yang bermuara pada kasus kekerasan gender.³⁴

³³ Dede Nurul Qamariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga." *Jurnal: Cendekiawan Ilmiah* 4, no. 1 (2019), h. 55.
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>

³⁴ Yanuarius You, et "Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua." *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 21, no. 1 (2019), h. 67, h. 12 <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/19335> .

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimana prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif. Peneliti kualitatif memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan menceburkan dirinya (melakukan *participant observation*) ke lokasi dengan pikiran seterbuka mungkin. Selanjutnya peneliti mengadakan *ceck* dan *recheck* dari satu sumber yang kemudian dibandingkan dengan sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar³⁵.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Waktu penelitian dilaksanakan di bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023.

C. Sumber Data

Subjek penelitian disebut dengan informan, ialah orang yang memberikan data tentang informasi yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari individual atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

³⁵ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020. 241

kuosioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam hal ini, untuk memperoleh informasi, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan PKK Desa Riwang yang terdiri dari kepala desa selaku penasehat PKK, Badan Penyantun PKK, ketua TP PKK, dan beberapa ketua POKJA PKK.

2. Sumber data sekunder

Data yang telah diproses disebut sebagai data sekunder dan dikirimkan oleh pengumpul data atau pihak lain, dan data ini didapat dari buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam proses penelitian agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian ini yaitu alat tulis, pedoman wawancara, pedoman wawancara, pedoman observasi dan alat dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Untuk menggunakan teknik ini, kita harus mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti³⁶. Teknik ini digunakan karena memungkinkan peneliti mengamati dan melihat secara langsung kemudian mencatat perilaku atau kejadian yang terjadi. Observasi ini dilakukan pada aktifitas yang dilakukan oleh anggota PKK. Dalam melakukan

³⁶ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020. 123

pengamatan (observasi), peneliti melakukan pengamatan tentang gambaran terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kesetaraan gender melalui organisasi PKK.

Tabel 3.1
Pedoman Observasi

NO.	Aspek yang diobservasi
1.	Keadaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang
2.	Hasil yang dicapai dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang.
3.	Kondisi kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam PKK
4.	Kondisi masyarakat yang terkena dampak dari adanya PKK di Desa Riwang.
5.	Kegiatan/program yang berjalan dan juga terhambat dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang.

6. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk melakukan percakapan dengan maksud tertentu atau dengan kata lain penulis melakukan percakapan dan tanya jawab kepada informan untuk memperoleh keterangan-keterangan

tambahan untuk memperkuat sumber data utama yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁷

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No.	Aspek dan Komponen
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) b. Program kerja PKK c. Faktor pendukung dan penghambat d. Peran Pemerintah e. Hambatan f. Realisasi pemberdayaan perempuan
2.	Kesejahteraan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan dan Konsumsi Pengeluaran b. Fasilitas tempat tinggal c. Kesehatan d. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
3.	Kesetaraan gender <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender b. Realisasi kesetaraan gender lewat PKK

7. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik dalam pengumpulan berbagai arsip, dokumen, atau piagam-piagam terkait dengan permasalahan penelitian yang ada

³⁷ Umar Sidik, M. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang pendidikan, Cet. 1 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 59-68.

pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian peneliti. Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip maka dapat memperkuat informasi awal. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh oleh kedua teknik sebelumnya. Teknik ini berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi, gambaran umum, letak geografis, sejarah berdirinya, sarana dan prasarana, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, tulisan-tulisan terkait penelitian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah mengenai tata kelola PKK Desa Riwang, program kerja dan strategi yang digunakan oleh PKK Desa Riwang itu apakah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sejauh mana persepsi masyarakat terkait kesetaraan gender. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diklarifikasi sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci dalam penelitian ini.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan cara *triangulasi* (bermacam-macam). *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan sebuah data dari berbagai sumber, cara serta berbagai waktu. Dengan demikian, maka terdapat teknik *triangulasi* yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data itu sendiri dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.³⁹ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data menurut Mles dan Hubermn dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif. Walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif pastinya juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan informasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, Edisi III. Bandung: Alfabeta, 2017. 464-466.

³⁹ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020. 161.

data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung.

2. Penyajian data atau data *display*

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. *Conclusion drawing or verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan yang hasilnya tidak konsisten dari penelitian yang dilakukan pertama kali, maka penelitian itu memiliki kecenderungan bersifat sementara dan cenderung berubah-ubah. Hal ini akan terjadi jika kesimpulan tidak didasari bukti yang kuat.⁴⁰

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Langkah-langkah Analisis Data

No.	Langkah	Impelementasi
1.	Koleksi Data	Melakukan observasi, wawancara dengan pengurus dan anggota PKK, pemerintah dan masyarakat setempat mengenai peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

⁴⁰ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edisi 1. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020. 163-171.

		dan implementasi kesetaraan gender lewat PKK.
2.	Reduksi Data	Menganalisis seluruh hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan buku untuk menghasilkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian.
3.	Penyajian data	Menyusun hal-hal pokok yang sudah dirangkum secara sistematis pada reduksi data untuk memperoleh tema dan pola secara jelas mengenai penelitian.
4.	Pengambilan kesimpulan	Memberikan makna dari data yang dikumpulkan dengan membuat kesimpulan mengenai peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis kesetaraan gender di Desa Riwang.

H. Definisi Istilah

1. Peran

Suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan masyarakat terkhusus perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

3. Mendukung

Mendukung yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana PKK sendiri dalam menunjang atau membantu pemerintah dalam mencapai kesejahteraan.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

6. Falah

Falah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kata ganti yang digunakan untuk kesejahteraan. Yang dimana falah merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan.

7. Berbasis

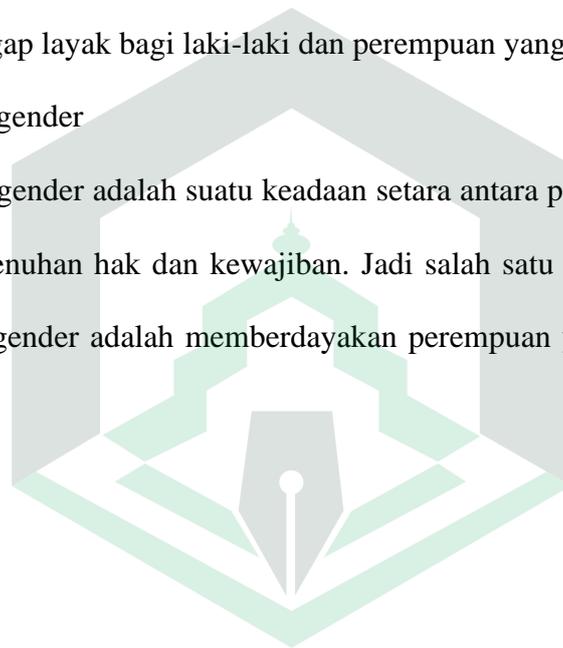
Beralaskan atau berdasarkan pada, jadi berbasis dalam penelitian ini adalah bagaimana PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada kesetaraan gender.

8. Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan.⁴¹

9. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender adalah memberdayakan perempuan yang wadahnya adalah PKK.



⁴¹ Siti Azisah et al., *Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Edisi Digital (2020) 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Riwang

a. Sejarah Desa Riwang

Desa Riwang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu yang dimana desa ini adalah hasil pemekaran dari desa Bilante pada tahun 1997. Pada tahun yang sama, desa Riwang dipimpin oleh Bapak M.Arif selaku kepala desa pertama selama dua tahun karena hanya sebagai pejabat sementara pada waktu itu. Setelah masa jabatan sementara berakhir, pada tahun 1999 dijabat oleh bapak Muh. Said selama satu periode dengan masa jabatan delapan tahun. Kemudian pada tahun 2007 s/d 2008 dijabat oleh bapak Sugianto Kadar,S,Pdi., namun karena pada saat itu beliau lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka beliau mundur atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Selanjutnya pada tahun 2009 s/d Bulan Februari 2015 dijabat oleh Bapak Hamzah. Hm dan selanjutnya dijabat oleh pejabat sementara dari Bulan Maret 2015 s/d Desember 2015 dijabat oleh Bapak Ir. Dahlan dan Alhamdulillah setelah dilakukan PILKADES maka kembali Bapak Hamzah. Hm sebagai Kepala Desa untuk Tahun 2016 s/d 2021. Selanjutnya dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa periode 2021 s/d 2026 dijabat oleh Bapak Karsing S.AP. Desa Riwang merupakan salah satu desa di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Provinsi

Sulawesi Selatan dan terletak ± 25 KM dari Ibu Kota Kabupaten Luwu, dan ± 5 KM dari Ibu Kota Kecamatan Larompong, dengan luas wilayah $\pm 3,1$ Km².

Secara administratif, wilayah Desa Riwang terdiri dari 5 Dusun yaitu Banjollo, Salu Tabang, Salu Riwang, Mandaiso, dan Riwang. Secara umum Tipologi Desa Riwang terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, jasa dan perdagangan). Topografis Desa Riwang secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah, berbukit bergelombang, perbukitan terjal dan pegunungan), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Riwang diklasifikasikan kepada, (dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl)/dataran tinggi (>500 m dpl). Jumlah Penduduk Desa Riwang berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 1238 jiwa.

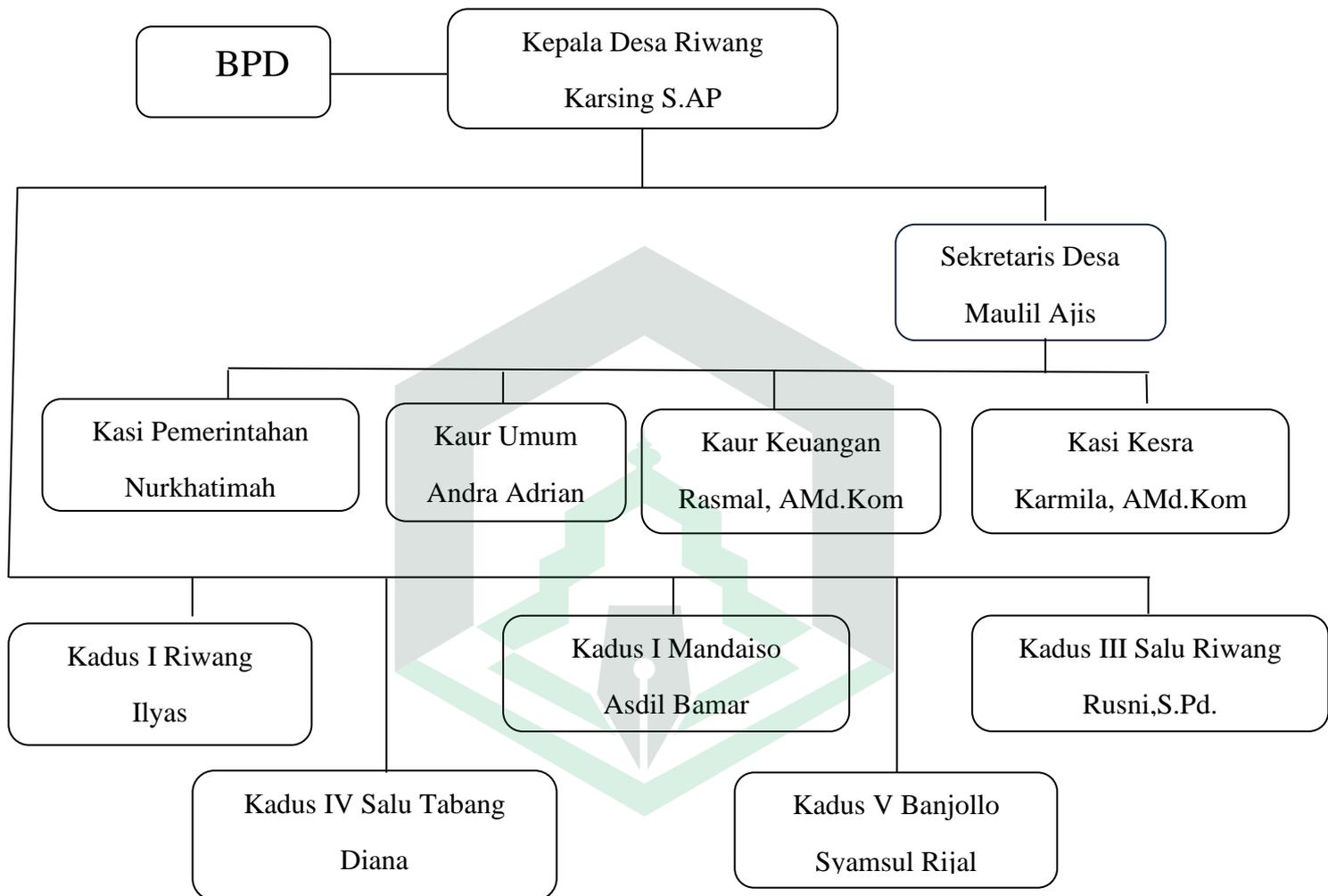
b. Letak dan luas wilayah

Desa Riwang merupakan salah satu dari 13 desa yang terdapat di Kecamatan Larompong. Desa Riwang memiliki luas wilayah 3,1 Km² yang tersebar di 5 dusun, yaitu, Dusun Banjollo, Dusun Salu Tabang, Dusun Salu Riwang, Dusun Mandaiso, dan Dusun Riwang.

c. Struktur organisasi Desa Riwang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Riwang



2. Gambaran umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD 1945. Upaya mencapai kesejahteraan dalam mengisi kemerdekaan ini tidak cukup dengan tenaga fisik, tetapi perlu dengan otak, penemuan-penemuan, semangat, pengorbanan dan kerja keras yang memberi nilai tambah dan manfaat bagi rakyat banyak. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dan penduduk yang berkualitas, mempunyai tingkat kesehatan yang prima, tingkat pendidikan yang tinggi, dan mampu bekerja keras, meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Menurut Tim penggerak PKK Pusat menyatakan bahwa gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Adapun tujuan dari Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya.⁴²

⁴² Hena Herlina, "Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Maasawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Moderat* Vol.5 No.2 (Mei 2019):205, : <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

Pemerintah Indonesia membentuk tiga organisasi pemberdayaan perempuan. Organisasi tersebut menjadi wadah agar perempuan di Indonesia mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Tiga organisasi itu adalah: Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan Organisasi PKK. Dharma Wanita merupakan wadah organisasi istri pegawai negeri sipil, Dharma Pertiwi adalah wadah organisasi istri anggota angkatan bersenjata untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pada setiap desa pemerintah membentuk organisasi PKK yang dimana anggotanya adalah perempuan di desa tersebut yang bukan istri pegawai negeri dan istri anggota angkatan bersenjata⁴³. Keterkaitan perempuan dengan PKK ialah mengenai bagaimana perempuan dapat aktif untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan di PKK sehingga eksistensi perempuan dapat diakui oleh semua pihak. Hasil pemberdayaan tersebut nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

⁴³ Arhem Zulham et al, *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*, Cetakan 1 (Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2020), 7.

berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.⁴⁴

Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang biasa disingkat menjadi PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga sejahtera, maju dan mandiri

b. Visi dan Misi PKK

(1) Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

(2) Misi

(a) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

(b) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.

⁴⁴ Dwi Muhammad Ramadani, "Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Nukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur," *Journal Ilmu Pemerintahan* 8,3 (2020): 677-690
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/JURNAL%20DWI%20\(12-12-20-09-56-12\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/JURNAL%20DWI%20(12-12-20-09-56-12).pdf)

- (c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- (d) Meningkatkan derajat kesehatan kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- (e) Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK, baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

c. Tujuan PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk dengan tujuan memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan PKK biasanya diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program kerja yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 53 tahun

2000 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), PKK mempunyai 10 program kerja yaitu:

Gambar 4.2

10 Program Kerja PKK Desa Riwang



Dari 10 program kerja PKK tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok program, yakni :

- (1) Program pokok yang dimana program pokok ini memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan sebutan 10 Program Pokok PKK.
- (2) Program prioritas (5 tahun) disebut juga program keutamaan, adalah kumpulan program yang merupakan penjabaran dari 10 Program Pokok PKK sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak.
- (3) Program kerja tahunan adalah kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program prioritas untuk kurun satu tahun anggaran yang pelaksanaannya dapat merupakan kegiatan tim penggerak PKK sendiri atau pun kegiatan unit atau instansi yang dikerjasamakan dengan tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK adalah pengelola gerakan PKK yang berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan yang tugasnya mengelola dan menggerakkan kegiatan PKK; diketuai oleh isteri pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional.

Adapun penanggung jawab pelaksanaan program pokok PKK adalah 4 (empat) kelompok kerja (Pokja) yang bersifat koordinatif satu sama lain, yaitu:

- (1) Pokja I mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong.

- (2) Pokja II mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi.
- (3) Pokja III mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang serta perumahan dan tatalaksana rumah tangga.
- (4) Pokja IV mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Sumber pembiayaan organisasi PKK adalah swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Bantuan pemerintah dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sehingga pada awalnya keberadaan PKK merupakan salah satu tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat (*top-down policy*) yang diarahkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dan pengurus PKK merupakan isteri-isteri para pejabat wilayah setempat (untuk daerah Provinsi/Kota/Kabupaten) dan isteri-isteri pejabat Kemendagri, yang berperan sebagai anggota *ex-officio*, baik sebagai pembina maupun pelindung di tingkat nasional. Masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi sampai dengan Tingkat Kelurahan tergantung pada masa jabatan suami masing-masing.⁴⁵

e. Sejarah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang

PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar home economic di bogor pada tahun 1957, dengan menghasilkan

⁴⁵ Lilik Aslichati, "Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Universitas Terbuka Volume 7, Nomor 1 (Maret 2020):1-3* <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/77/64>

rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh kementerian pendidikan, pengajaran kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 kehidupan keluarga sebagai kurikulum. Pada bulan mei tahun 1962 di desa salaman kabupaten magelang, provinsi jawa tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 segi kehidupan keluarga.

Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat jawa tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah dieng kabupaten wonosobo diantara mereka banyak yang menderita *Honger Odeem (HO)*. Kenyataan itu menyentuh hati ibu Isriati moenadi. sebagai Istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur isteri pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 segi pokok PKK secara intensif.

Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pada Tahun 1972 Menteri Dalam Negeri mengirim surat nomor :sus 3/6/12 tanggal 27 desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada gubernur seluruh indonesia, yang isinya agar menyesuaikan Nomenklatur PKK dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di daerah dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Pendidikan

kesejahteraan keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah dan pendidikan masyarakat (penmas) sampai sekarang.

Karena PKK pada saat itu merupakan program nasional yang harus ada didalam suatu wilayah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, maka sejalan dengan berdirinya desa Riwang pada tahun 1997 terbentuklah pengurus TP PKK Desa Riwang sampai sekarang.

f. Tenaga Kepengurusan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang

PKK desa Riwang memiliki pengurus sebanyak 12 orang yang membantu dalam proses pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan dari PKK. Dalam melaksanakan suatu kegiatan terdapat penanggung jawab dalam setiap divisi program yang sudah ditentukan tugas dan kewajibannya. Kerjasama yang kompak dibutuhkan dalam PKK agar tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai maksud tujuannya.

Pengurus PKK Desa Riwang sebagian besar telah memiliki pekerjaan di luar pengurusan PKK, namun mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan di Desa Riwang melalui PKK sehingga kehidupan masyarakat sejahtera, dapat memperoleh hasil dari keterampilan yang diadakan oleh PKK sehingga dapat memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berikut data kepengurusan PKK di Desa Riwang:

Tabel 4. 1
Daftar Kepengurusan PKK Desa Riwang

Nama	Kedudukan Dalam PKK
Nurwaliah	Ketua TP PKK
Drs. Muhammad Ishak	Badan Penyantun
Karsing S.Ap	Penasehat
A.Sri Wahyuni,S.Pd.	Wakil Ketua
Rusdiati	Bendahara 1
Helmiana Burhan	Bendahara 2
Rusni,S.Pd.	Sekretaris 1
Citra Dewi	Sekretaris 2
Ernayanti	Ketua Pokja 1
Wahida,S.Pd.	Ketua Pokja II
Nurkhatimah	Ketua Pokja III
A.Nur Ainun	Ketua Pokja IV

PKK Desa Riwang memiliki anggota sebanyak 28 orang yang terdaftar namanya. Namun, Jumlah anggota tersebut masih fluktuatif yang artinya masih selalu berubah karena masuknya anggota baru maupun anggota lama yang keluar ataupun tidak aktif lagi dalam kegiatan PKK. Anggota baru yang baru masuk akan dibimbing secara bertahap supaya mengikuti anggota lain yang telah lama bergabung dan mendapat pengetahuan yang lebih luas dibanding anggota baru.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang dalam pelaksanaan program kerja.

Dalam pelaksanaan program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu terdapat faktor pendukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap berlangsungnya kegiatan ataupun program kerja dari PKK di Desa Riwang.

Untuk itu dari beberapa program kerja tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan pengurus PKK desa Riwang.

- a. Pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Nurwaliah, selaku ketua TP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang mengenai faktor pendukung yang dihadapi PKK dalam menjalankan kegiatan atau program kerja dari POKJA II.

“Kalau terkait faktor pendukung kami PKK dalam menjalankan kegiatan atau program kerjanya kami itu, dari anggota atau kader PKK sendiri yang Alhamdulillah anggota rajin-rajin, kalau kita atau Desa ada kegiatan mereka semua pada cepat kumpulnya nda usahmi dicari didatangi satu-satu lagi kerumahnya, yang penting mereka dengar atau dikirimkan undangan satu kali mereka pasti datang”.⁴⁶

Salah satu faktor yang menjadi faktor pendukung PKK dalam menjalankan kegiatannya atau program kerjanya adalah semangat dari kader PKK itu sendiri. Hal tersebut juga dikemukakan oleh ibu Wahida,S.Pd. selaku Ketua Pokja II PKK Desa Riwang, yaitu:

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Nurwaliah (Ketua TP PKK Desa Riwang). Pada tanggal 20 Juli 2023

“Kalau kita-kita yang memang masuk jadi TP PKK bisa dibilang aktifji, soalnya setiap ada kegiatan hampir semua dari kita datang, paling kalau yang tidak datang itu yang sedang berhalangan atau sibuk memang, saya itu dek kusuka sekali ikut kegiatan PKK karena bisaka kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain apalagi kalau ada kegiatannya PKK tambah kusuka karena Pak Desa sendiri sama aparat-aparatnya termasuk saya juga suka bantu-bantu.”⁴⁷

Selain semangat dari kader PKK, dukungan dari pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor yang pendukung jalannya kegiatan dari PKK POKJA II di Desa Riwang, hal tersebut juga diungkapkan lagi oleh Ibu Nurwaliah:

“disini juga Lasmi, aparat maupun pak desanya sendiri mendukung terus juga kalau ada kegiatan jadi kita PKK merasa tidak berjalan sendiri karena didukung dari pemerintah”⁴⁸

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Karsing S.Ap., selaku kepala Desa Riwang yang menyatakan:

“Karena menjadi kewajibanmi itu kita sebagai aparat desa membantu jalannya kegiatan apalagi kegiatannya positif, hal baik semua yang dilakukan, yah pemerintah desa ikut serta juga didalamnya baik itu kegiatannya karang taruna, kegiatannya PKK, kami dukung semua, kalau untuk PKK kita sebagai pemerintah desa membantu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehubungan dengan program PKK apa yang ingin dicadangkan, walaupun ada yang sifatnya pembiayaan, tergantung dari kondisi keuangan desa, kadang diswadayakan ada yang disubsidi dari masyarakat ”.⁴⁹

Selain menjadi kewajiban pemerintah untuk turut andil dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, kepala desa bersama dengan aparatnya membantu PKK dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh PKK.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Wahida,S.Pd (Ketua Pokja II PKK Desa Riwang), Pada tanggal 20 Juli 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Nurwaliah (Ketua TP PKK Desa Riwang). Pada tanggal 20 Juli 2023

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Karsing S.Ap (Kepala Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

Selanjutnya faktor penghambat yang dihadapi oleh POKJA II dalam menjalankan program kerjanya adalah kurangnya dana PKK untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan sesuai dengan program PKK seperti pelatihan dan penyuluhan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Wahida,S.Pd selaku ketua POKJA II Desa Riwang.

“ sama juga nak, karna dari POKJA II itu banyak yang menggunakan anggaran, jadi biasa terkendala kalau mau laksanakan kegiatan karena tidak ada dana karna kan PKK hanya sifatnya swadaya, jadi ditunggu dulu terkumpul dari anggota PKK baru kita laksanakan kegiatan”.⁵⁰

Selain hal tersebut, faktor penghambat TP PKK dalam menjalankan kegiatannya juga karena pemasaran dari hasil kegiatan yang belum maksimal. Seperti yang diungkapkan Ibu Nurwaliah selaku ketua PKK yaitu:

“Dulu waktu awal-awal ada PKK semangat semua kadernya bikin-bikin sesuatu, kayak bikin lap kaki, bikin kue, banyak tapi sekarang biasaji nabikin tapi tidak terlalu banyak karena yang beli itu orang-orang disini”.⁵¹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Wahida,S.Pd., selaku ketua Pokja II yang memberikan pernyataan, yaitu:

“saya selaku Pokja II bidang pendidikan dan keterampilan itu, kendalaku kalau ada kegiatan yang sudah diberikan sama kader PKK seperti membuat kerajinan sama makanan harapannya kan kader itu nabuatmi dirumahnya terus dijual tapi karena jarang ada yang mau beli jadi hanya beberapa ji kader yang buat ii”⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Wahida,S.Pd (Ketua Pokja II PKK Desa Riwang), Pada tanggal 20 Juli 2023

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Nurwaliah (Ketua TP PKK Desa Riwang). Pada tanggal 20 Juli 2023

⁵² Wawancara dengan Ibu Wahida, S.Pd. (Ketua Pokja II PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

b. Pangan,sandang,serta perumahan dan tata laksana rumah tangga

Pangan,sandang, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga merupakan program kerja dari POKJA III. Yang dimana faktor pendukung POKJA III dalam menjalankan program kerjanya sama halnya dengan yang dialami oleh POKJA II yaitu semangat dari kader PKK dan dukungan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nurkhatimah selaku ketua POKJA III yang mengungkapkan:

“kalau kami dari POKJA III hal yang mendukung di, semangatnya kader-kader, baik itu pengurus, pemerintah, anggota PKK. Krna kan saya ada prokerku itu lomba membuat menu sehat setiap tahunnya skop dasawisma, dari situ bisa dilihat kalau memang kader itu semangat kalau mau ada lomba itu”⁵³

Namun yang menjadi faktor penghambatnya adalah selama ini selalu mengalami kesulitan dalam mengumpulkan prasarana atau perlengkapan untuk lomba. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Nurkhatimah selaku ketua POKJA III, yang mengungkapkan bahwa:

“tapi ituji kalau maumiki lomba selalu pasti terkendala masalah prasarana yang susah didapatkan atau dikumpulkan”⁵⁴

c. Kesehatan

program kerja kesehatan ini merupakan ruang lingkup dari POKJA IV yang dimana dalam melaksanakan program kerjanya ada beberapa kendala yang

⁵³ Wawancara dengan Ibu Nurkhatimah (Ketua Pokja III PKK Desa Riwang), Pada tanggal 20 Juli 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Nurkhatimah (Ketua Pokja III PKK Desa Riwang), Pada tanggal 20 Juli 2023

dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyuluhan stunting dan KB yang diadakan seperti yang diungkapkan ibu A.Nur Ainun yang mengatakan bahwa:

“kalau terkait kendala, ituji masih kurang pemahamannya masyarakat terkait penyuluhan KB sama apa itu stunting sebenarnya, bagaimana bisa anak stunting, yang kebanyakan hanya tau stunting itu yah bawaan dari lahir padahal tidak”⁵⁵

Selanjutnya terkait faktor pendukungnya, tingginya semangat dari kader maupun bantuan dari masyarakat ketika PKK itu mengadakan penyuluhan, sosialisasi, posyandu, dan membuat pamphlet terkait stunting, hidup sehat, dan sebagainya.

Hal tersebut diungkapkan lanjut oleh ibu A.Nur Ainun selaku ketua POKJA IV yang mengatakan bahwa

“kan kami dari PKK selalu adakan sosialisasi stunting, perilaku hidup sehat, bagaimana caranya mencegah penyakit, mencuci tangan dengan baik, kalau dilakukan itu pasti warga semangatji untuk ikut”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu A.Nur Ainun (Ketua Pokja IV PKK Desa Riwang), Pada tanggal 20 Juli 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu A.Nur Ainun (Ketua Pokja IV PKK Desa Riwang), Pada tanggal 20 Juli 2023

2. Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Riwang dalam mendukung falah berbasis kesetaraan gender

Untuk melihat peran Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis kesetaraan gender, penulis melihat dari beberapa indikator yang dimana PKK menunjang indikator tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

a. Pendapatan dan konsumsi keluarga

Pendapatan dan konsumsi keluarga merupakan sebuah penghasilan atau pengeluaran yang didapatkan atau yang dikeluarkan dalam sebuah keluarga. Kesejahteraan suatu keluarga dapat dinilai dari seberapa besar penghasilan yang didapatkan dan seberapa besar yang dikeluarkan untuk pemenuhan konsumsinya dalam jangka waktu tertentu, baik itu konsumsi kebutuhan primer yang berupa pangan dan sandang maupun kebutuhan sekunder.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator pendapatan dan konsumsi keluarga yang tergabung dalam PKK, diperoleh data sebagai berikut:

Bapak Karsing S.Ap adalah seorang Kepala Desa Riwang, mengatakan bahwa:

“Kalau terkait perannya PKK dalam menambah pendapatan keluarga itu, memang berperan, karena didalam PKK Lasmi, ada kegiatan yang sifatnya memberdayakan kadernya seperti pelatihan peningkatan keterampilan. Jadi ketika keterampilannya meningkatmi, bisami buat

sesuatu otomatis hasilnya nanti bisami meningkatkan pendapatan keluarganya”.⁵⁷

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran PKK dalam meningkatkan pendapatan dan konsumsi keluarga, memang ada diantaranya membangun dan memberdayakan masyarakatnya dengan cara meningkatkan keterampilan yang dengan otomatis dapat menambah pendapatan rumah tangganya.

Selain informasi yang didapatkan dari bapak Karsing S.Ap, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurwaliah, selaku Ketua PKK Desa Riwang , yang mengatakan bahwa:

“iye, PKK disini memang sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga karena tidak ada kegiatannya PKK yang sifatnya tidak membangun, contohnya saja kegiatan pelatihan kader PKK buat kue, buat lap kaki, pelatihan yang memang bisa meningkatkan kreatifitasnya untuk nanti hasilnya dapat memenuhi kebutuhannya gah atau kebutuhan keluarganya mi juga”.⁵⁸

Dari penjelasan ibu Nurwaliah diatas, tidak berbeda jauh dengan hasil wawancara bapak Karsing, S.Ap, yang mengatakan bahwa peran PKK sangat penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa Riwang, dikarenakan seluruh kegiatannya bersifat membangun yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun individunya.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rosliana, selaku anggota PKK yang menjelaskan bahwa:

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Karsing S.Ap (Kepala Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023)

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nurwaliah (Ketua TP PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023)

“kalau peran PKK nak memang sangat penting, karena banyak bang dia pelatihnannya, diajarmiki juga memanfaatkan barang bekas kayak itu kain-kain yang tidak dipakai dijadikanmi lap kaki, supaya kaya sayami Ibu Rumah Tanggaka (IRT) ada lagi dikerja-kerja untuk tambah-tambah uang belanja sehari-hari)”.⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan ibu Rosliana, menerangkan bahwa PKK sangat penting, karena dari PKK mereka diajarkan untuk menjadi masyarakat yang kreatif dengan memanfaatkan barang bekas, yang nantinya hasil dari kerajinan tersebut dapat menambah pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain mengadakan pelatihan, PKK Desa Riwang sendiri sangat memperhatikan keadaan ekonomi kader ataupun masyarakat yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. Muhammad Ishak, yang menyatakan:

“Jadi disini nak, ada semacam koperasi perdagangan yang disitu ada campur tangan PKK, katakanlah itu beras sekian persen, disini ada jempitan berupa uang dan bisa sama beras yang dimana bisa meringankan beban hidup masyarakat yang ada khususnya rumah tangga. Yang dimana sewaktu-waktu, jika kehabisan bisa diambil, habis uangnya, ada jempitannya bisa ditarik, ada uangnya, bisa ditarik”.⁶⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran PKK dalam masyarakat memang ada diantaranya, dengan membentuk koperasi yang dengan otomatis bisa meringankan beban hidup masyarakat.

Selain informasi yang didapatkan dari bapak Drs. Muhammad Ishak, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Wahida S.Pd selaku ketua Pokja II, yang menyatakan:

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Rosliana (Anggota PKK) pada tanggal 20 Juli 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ishak (Badan Penyantun PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023)

“ Di PKK kita diajarkan untuk bagaimana kehidupan berkoperasi itu untuk meringankan beban keluarga, jadi ada koperasi disini untuk dibentuk PKK yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menabung baik itu berasnya, ataupun uangnya, kita juga selaku Pokja II didorong untuk memotivasi itu warga agar mau jadi anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga”⁶¹

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu wadah yang disediakan PKK untuk meringankan beban keluarga adalah dengan membentuk koperasi.

b. Fasilitas tempat tinggal

Fasilitas tempat tinggal merupakan sebuah hal yang sangat penting pada sebuah keluarga dalam hal menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam hal fasilitas tempat tinggal, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua PKK Desa Riwang, ibu Nurwaliah yang menyatakan:

“Perlu kita ketahui Lasmi, bahwa dinas kesehatan terkait berkerja sama lewat PKK ini memberikan jamban keluarga sebanyak berapa rumah itu saya lupa, kalau nda salah 20 rumah, dibelikan klosetnya, baru septic tanknya dibuatkan tanpa pembiayaan sedikitpun dari yang punya rumah”⁶²

Jadi dari segi fasilitas tempat tinggal, PKK sendiri bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait untuk memberikan jamban kepada keluarga. Jadi yang tadinya masyarakat tersebut hanya memanfaatkan MCK fasilitas MCK (Mandi, cuci, kakus) umum serta sungai yang ada di sekitaran rumah mereka, kini sudah mempunyai jamban atau MCK pribadi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Nurkhatimah, selaku kader PKK dan ketua Pokja III, menyatakan:

“dulu saya dek tidak ada wc pribadiku, jadi kalau mauka mencuci, mandi dan sebagainya turunka ke sungai tapi waktu tahun lalu dari dinas

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Wahida, S.Pd., (Ketua Pokja II) pada tanggal 20 Juli 2023)

⁶² Wawancara dengan Ibu Nurwaliah (Ketua PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli

kesehatan bekerja sama dengan PKK datang untuk buat MCK pribadi jadi sekarang tidak terlalu sering mikanya turundisungai untuk mandi dan sebagainya dek”.⁶³

Berdasarkan penjelasan Ibu Nurkhatimah diatas, menjelaskan bahwa dulunya beliau hanya memanfaatkan sungai yang berada dekat rumahnya untuk MCK, namun pemerintah lewat PKK memberikan bantuan untuk masyarakat yang belum mempunyai fasilitas MCK sehingga beliau tidak terlalu memanfaatkan sungai lagi untuk mck.

c. Kesehatan

Untuk mengetahui peran PKK dalam segi ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu A.Nur Ainun selaku ketua Pokja IV PKK Desa Riwang, menyatakan:

“salah satu program kerja dari PKK itu membuat pendekatan dengan lima pilar utama yang dikenal dengan istilah STBM yang kepanjangannya yaitu sanitasi total berbasis masyarakat ini merupakan program kerja dari dinas kesehatan yang dimasukkan kedalam program pokok PKK, selanjutnya setiap tiga bulan kami mengadakan lomba kebersihan untuk memotivasi masyarakat untuk hidup sehat”.⁶⁴

Salah satu program yang dilakukan PKK untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan STBM dengan lima pilar dan mengadakan lomba kebersihan setiap tiga bulan, selanjutnya hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Ernayanti, selaku ketua Pokja I PKK Desa Riwang, menyatakan:

⁶³Wawancara dengan Ibu Nurkhatimah (Ketua Pokja III PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

⁶⁴Wawancara dengan Ibu A. Nur Ainun (Ketua Pokja IV PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

“kalau mau kita tahu PKK disini mengadakan program STBM dengan 5 pilarnya yaitu pertama stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga, jadi di PKK diatur semua terkait itu”.⁶⁵

Jadi dalam PKK sendiri, lewat program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menuntut masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat untuk selalu hidup sehat. Selanjutnya hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Drs. Muhammad Ishak selaku badan penyantun PKK, dimana beliau mengatakan bahwa:

“ jadi, kita disini di Desa Riwang ini, kalau dari PKK itu lasmi, ada pendekatan yang namanya STBM, mauki tahu apa itu STBM? STBM itu adalah pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk tidak kotor-kotor ii didalam bermasyarakat, jadi di PKK itu ditanamkan memang dalam dirita untuk selalu hidup higienis, per tiga bulan itu diadakan semacam seminar terkait ini supaya diingatkan terus ii masyarakat, begitu lasmi”.

Dari penjelasan Bapak Drs. Muhammad Ishak diatas, dapat disimpulkan bahwa peran PKK dari segi kesehatan melakukan pendekatan dengan STBM yang dimana STBM ini merupakan pendekatan yang dilakukan PKK untuk mengubah perilaku hidup masyarakat untuk hidup higienis atau hidup bersih.

d. Pendidikan

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti tentang peran PKK dalam hal kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan diperoleh data sebagai berikut:

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ernayanti (Ketua Pokja I PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

Ibu Wahida S.Pd., selaku ketua POKJA II, mengatakan bahwa:

“kalau terkait itu, rata-rata kader PKK sejauh semua kader memiliki kesadaran yang baik dan luas terhadap kewajiban belajar dan berpendidikan dasar anak-anak mereka karena di PKK selaluki adakan penyuluhan terakit wajib belajar 12 tahun. Tapi kalau dari PKK itu sendiri kami ada program yang namanya massikola sule yang bekerja sama dengan pemerintah”.⁶⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kader PKK Desa Riwang sendiri memiliki kesadaran yang baik dan luas terhadap kewajiban belajar dan berpendidikan dasar anaknya karena lewat PKK masyarakat diberikan pengertian terkait wajib belajar 12 tahun. Namun dalam hal pendidikan, pemerintah bekerja sama dengan PKK membuat program yang bernama massikola sule.

Selain informasi yang didapatkan dari Ibu Wahida S.Pd., peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurwaliah selaku ketua PKK, menyatakan bahwa:

“Peran PKK dari pendidikan, sekarang ada programnya pemerintah Luwu yang disebut dengan massikola sule atau sekolah kembali, jadi melalui PKK, bekerja smaa dengan dinas pendidikan, bekerja sama dengan bunda PAUD, jika ada anak anak yang putus sekolah dari sd-smp itu karena yang dulunya masyarakat kurang paham terkait wjaib belajar itu akan diambil kembali itu akan disekolahkan entah itu pendidikan formal atau jalur lain. Jadi tidak ada lagi orang yang putus sekolah”.⁶⁷

Dari pemaparan Ibu Nurwaliah diatas, sudah jelas bahwa PKK memiliki peran dari segi pendidikan dengan bekerja sama dengan pemerintah dinas

⁶⁶ Wawancara dengan IbuWahida S.Pd (Ketua Pokja II PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ishak (penyantun dan anggota Pokja II) pada tanggal 20 Juli 2023

pendidikan dan juga bunda PAUD, mengadakan program dengan istilah sekolah kembali dengan tujuan tidak ada lagi orang yang putus sekolah.

Setelah peneliti melakukan wawancara terkait peran PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berdasarkan empat indikator tersebut, peneliti kembali melakukan wawancara terkait realisasi kesetaraan gender dalam kesejahteraan masyarakat tersebut lewat PKK.

Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Karsing S.Ap., selaku kepala desa Riwang terkait hal tersebut yang menyatakan bahwa:

“Kalau terkait kesetaraan gender, saya nak sebagai kepala desa melihat terkait itu sudah terealisasi, apa contohnya, yah dalam PKK toh sebenarnya kan PKK diperuntukkan untuk kaum perempuan, tapi di desa Riwang sendiri, kita masukkan laki-laki yang mau bergabung dan memberikan hal positif didalamnya contoh lain, seperti yang kita bilang tadi kalau kesetaraan gender itu ada supaya perempuan juga dapat mengambil peran, selain PKK kita juga memilih kepala dusun itu ada perempuan dan laki-laki jadi adil tidak ada pembeda semua berhak mengambil peran”.⁶⁸

Dari pemaparan Bapak Karsing diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk membantu pemerintah dalam kesetaraan gender, di Desa Riwang sudah terealisasi, jadi selain untuk memberdayakan kaum perempuan, laki-laki di desa tersebut juga diberikan ruang untuk masuk ke PKK agar tidak ada yang terkena ketidakadilan gender.

Selain informasi yang didapatkan dari Bapak Karsing,S.Ap., peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Wahida,S.Pd., selaku ketua POKJA II PKK Desa Riwang, yang menyatakan bahwa:

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Karsing S.Ap (Kepala Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023)

“Terkait itu nak, kalau saya adanya PKK itu bentuk upaya pemerintah dalam kesetaraan gender, karena kan PKK sebagai wadah untuk memberdayakan kita-kita ini kaum perempuan, misalkan ada sesuatu yang mau dibuat atau diadakan di desa ini, kita ini PKK selalu diundang pak desa untuk ikut juga rapat atau pasti kita juga dikasi jadi panitia miki”.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PKK dibuat untuk memberdayakan kaum perempuan agar kesetaraan gender dapat terealisasikan, dan di desa Riwang ketika ingin mengadakan sesuatu atau membuat sesuatu, perempuan lewat PKK diikutsertakan dalam rapat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Nurwaliah, selaku ketua PKK Desa Riwang yang menyatakan bahwa:

“bisaki liat sendiri nak memang PKK itu bagus sekali, bisami kita liat sendiri toh, mulai itu tadi dari segi pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll itu kita rasakan yang dulunya itu kita-kita ibu-ibu tinggal bangjiki dirumah sakit kepala sekarang ikut terus miki kegiatannya desa, kecamatan, bahkan kabupaten kita dilibatkan terus kayak lomba senam dan sebagainya”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa PKK berperan penting dalam kesetaraan gender, karena yang dulunya ibu-ibu disana hanya tinggal dirumah namun setelah adanya PKK perempuan di desa tersebut menjadi lebih produktif.

d. Pembahasan

1. Faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan program kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan

⁶⁹ Wawancara dengan IbuWahida S.Pd (Ketua Pokja II PKK Desa Riwang) pada tanggal 20 Juli 2023

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Bab 1 Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: “Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya”. Berdasarkan peraturan menteri diatas, dapat disimpulkan bahwa PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang berperan untuk memberdayakan masyarakat. Namun dalam menjalankan peran tersebut masih ada hal yang mendukung dan menghambat PKK untuk menjalankan peran tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah peneliti temukan dilokasi penelitian.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Riwang dalam menjalankan program kerjanya yang telah dibagi kedalam empat POKJA yang dimana POKJA tersebut bersifat koordinatif satu sama lain. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat PKK dalam menjalankan program kerjanya yang dimana PKK memiliki sepuluh program kerja namun didalam penelitian ini hanya mengambil tujuh proker yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau falah yang dimana tujuh program kerja tersebut termasuk kedalam POKJA II,III, dan IV.

a. POKJA II

POKJA II memiliki ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Faktor pendukung yang dihadapi PKK dalam menjalankan proker dari POKJA

II ini adalah pertama semangat dari kader PKK itu sendiri. Semangat ini dilihat pada saat peneliti melakukan observasi dan melalui keterangan informan dari hasil wawancara. Para wanita atau ibu-ibu tetap semangat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK walaupun mereka memiliki peran ganda dalam rumah tangga yang dimana mereka memiliki keluarga yang harus diurus dirumah tetapi mereka tetap berusaha hadir demi menjalankan kewajibannya sebagai kader dan mendapatkan pengetahuan yang diajarkan.

Kedua, dukungan dari pemerintah setempat, dukungan ini terlihat pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Dimana para perangkat desa juga ikut mensosialisasikan kegiatan dari PKK bahkan turut andil dalam menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKK. Dukungan dari pemerintah setempat ini menjadi motivasi positif tersendiri untuk organisasi PKK karena ada yang mendukung untuk melaksanakan kegiatannya.

Selanjutnya, faktor penghambat PKK dalam menjalankan proker dari POKJA II adalah kurangnya dana dari PKK untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan karena sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dana PKK hanya bersifat swadaya. Selanjutnya pemasaran dari hasil kegiatan yang belum maksimal dikarenakan masyarakat hanya mempromosikan produk di daerah rumahnya saja. Hal ini menjadi kendala untuk PKK dalam menambah pendapatan keluarga. Pemasaran yang belum optimal menjadi pemicu kurangnya minat belajar dari masyarakat untuk membuat hasil dari yang didapatkan dari pelatihan PKK dan

mempengaruhi semangat kehadiran untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK.

b. POKJA III

POKJA III mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang,serta perumahan dan tata laksana rumah tangga. Faktor pendukung yang dihadapi PKK dalam menjalankan proker dari POKJA III sama halnya dengan POKJA II yang dimana faktor pendukung yang pertama adalah semangat dari kader PKK dan dukungan pemerintah setempat. Dimana pada POKJA III ini ada kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya yaitu membuat menu sehat yang merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan proker POKJA III. Namun yang menjadi faktor pendukungnya adalah ketika melaksanakan kegiatan tersebut, kader PKK terkendala dalam mengumpulkan prasarana ataupun perlengkapan yang digunakan dalam lomba.

c. POKJA IV

POKJA IV mempunyai ruang lingkup dan fungsi pada bidang kesehatan. Faktor pendukung yang dihadapi PKK dalam menjalankan program kerja kesehatan ini adalah kehadiran atau semangat masyarakat ketika diadakannya penyuluhan KB, stunting dan posyandu dan bekerja sama saat pemasangan pamphlet penyuluhan. Namun yang menjadi kendala adalah masyarakat masih minim pemahaman terkait stunting walaupun penyuluhan sudah diadakan.

Faktor pendukung PKK dalam memberdayakan masyarakat juga didukung oleh RAKERNAS PKK Berdasarkan keputusan ketua umum TP PKK :01/KEP/PKK PST/VII/2010 TENTANG RUMUSAN HASIL

RAKERNAS VII PKK TAHUN 2010 menyatakan : “bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan pemantapan pengelolaan Gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna”. Ini berarti, dalam menjalankan kegiatannya tugasnya PKK dapat memanfaatkan sumber daya agar hasil dari kegiatan PKK dapat berguna bagi pembangunan nasional. Pengelolaan yang dilakukan PKK dilapangan penelitian baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam telah dilaksanakan dalam mengimplementasikannya PKK bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada didesa.

2. Peran Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis kesetaraan gender di Desa Riwang

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal yang salah satunya peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Maka hal tersebut sejalan dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dimana PKK ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Peranan PKK merupakan segala macam tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang banyak dilakukan PKK mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah rumah tangga (RT) hingga Desa dan Kelurahan. PKK bahkan bertugas untuk mensukseskan program

pemerintah dan secara tegas pemerintah menyebutkan bahwa PKK berperan dan bertujuan sebagai pembantu pemerintah dalam usaha pembangunan.

Peranan PKK tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, kemudian lebih dikenal dengan “sepuluh program pokok PKK”. Kesepuluh program tersebut adalah penghataan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Dengan sepuluh program tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Supaya dalam pelaksanaannya dapat berdaya dan berhasil guna, maka PKK membentuk Kelompok Kerja (PKK) dengan spesifikasi penganganan yang khusus. Pokja-pokja tersebut (sekarang ada empat pokja) berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga koordinasi diantara keempat pokja tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

a. Pendapatan dan konsumsi keluarga

Menurut Dougherty dan Pritchard, peran adalah memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Hal tersebut sejalan dengan peran PKK dari segi pendapatan dan konsumsi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti, peranan PKK dalam meningkatkan pendapatan dan konsumsi keluarga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberdayakan anggota PKK seperti peningkatan keterampilan pembuatan keset kaki dan pembuatan kue yang sebagian besar diikuti oleh kaum perempuan. Dari situ mereka rasakan sendiri perubahan tersebut dimana dulunya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan, akan tetapi setelah bergabung di PKK mereka diajarkan untuk membuat produk seperti yang dilakukan PKK Desa Riwang yaitu merajut lap kaki, pembuatan kue yang nantinya bisa dijual. ketika keterampilan meningkat secara otomatis pendapatan serta konsumsi keluarga juga meningkat.

Selanjutnya, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, selain pelatihan keterampilan dari PKK, di Desa Riwang terdapat koperasi yang dibentuk oleh PKK dimana koperasi ini dikelola langsung oleh PKK yang seluruh anggota koperasi ini adalah kaum perempuan yang dapat membantu atau menunjang perekonomian masyarakat dalam hal menabung atau istilah yang digunakan di desa Riwang disebut dengan penjempitan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan juga dapat dilihat peningkatan pendapatan dan konsumsi keluarga khususnya kaum perempuan meskipun masih dalam skala kecil, namun hal tersebut membawa pengaruh positif bagi anggotanya.

b. Fasilitas tempat tinggal

Menurut Merton, peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Ibu Nurkhatimah:

“dulu saya dek tidak ada wc pribadiku, jadi kalau mauka mencuci, mandi dan sebagainya turunka ke sungai tapi waktu tahun lalu dari dinas kesehatan bekerja sama dengan PKK datang untuk buat MCK pribadi jadi sekarang tidak terlalu sering mika turundisungai untuk mandi dan sebagainya dek”

Informan diatas mengatakan bahwa peranan PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dari segi fasilitas tempat tinggal, memang benar adanya dikarenakan karena beliau yang dulunya tidak mempunyai MCK pribadi namun lewat PKK yang bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam hal ini pemerintah memberikan jamban gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Jadi masyarakat yang tadinya hanya memanfaatkan sungai sebagai fasilitas MCK, sekarang telah mempunyai MCK pribadi.

c. Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, diperoleh informasi bahwasanya peranan PKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari indikator kesehatan, PKK lewat program kerjanya yaitu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dimana program ini merupakan program kerja dari POKJA IV yang bekerja sama dengan dinas kesehatan yang dimana perempuan terjun langsung ke tempat untuk melaksanakan sosialisasi dengan tujuan untuk mengubah perilaku Higiene dan Sanitasi melalui pemberdayaan

masyarakat dengan metode pemucuan. Program Nasional STBM ini, dikhususkan untuk skala rumah tangga sehingga kegiatan ini adalah program yang berbasis masyarakat.

Ketua Pokja IV juga menyatakan bahwa ada 5 Pilar STBM yaitu:

- (1) Stop BAB sembarangan, yang mana masyarakat di ajak untuk tidak buang air besar sembarangan seperti disungai, dihutan atau pun disembarangan tempat yang bisa berakibat menjadi tempat perkembangbiakan serangga atau binatang penular penyakit.
- (2) Cuci tangan pakai sabun, dengan mencuci tangan pakai sabun ini dapat menurunkan resiko penyakit menular dan dapat mengeliminir penyakit.
- (3) Pengelolaan air minum rumah tangga, yang mana air jernih belum tentu bebas dari kuman dan masyarakat di ajak untuk memasak air sebelum dikonsumsi.
- (4) Higiene sampah atau pengamanan sampah, dengan 3R yaitu Reduce yang berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, REUSE atau menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau pun fungsi lain dan yang terakhir RECYCLE yang berarti mengolah kembali sampah menjadi barang yang baru (daur ulang).
Pengolahan Limbah Cair rumah tangga seperti limbah jamban yang mencakup air seni dan tinja dan limbah non jamban seperti air bekas cucian atau sejenisnya.

Selain hal tersebut, peneliti pada saat melakukan observasi melihat para ibu-ibu peserta PKK ini turut andil di bidang kesehatan dan KB,

pelayanan posyandu, sosialisasi tanaman obat, dan selalu melakukan sosialisasi terkait kesehatan dan untuk mengevaluasi terkait hal tersebut dan memberikan dorongan terhadap masyarakat, pengurus PKK mengadakan lomba kebersihan setiap tiga bulan sekali.

d. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, terkait indikator tersebut, diperoleh informasi bahwasanya dalam bidang pendidikan, PKK rutin mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan untuk masyarakat atau anggota PKK yang dulunya kesulitan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, setelah adanya PKK, masyarakat diajarkan untuk memiliki kesadaran tentang kewajiban belajar, namun untuk anak yang terlanjur tidak sekolah, pemerintah bekerja sama dengan PKK dalam hal ini kaum bunda PAUD yaitu perempuan mengadakan program yang bernama “massikola sule” dengan tujuan bilamana ada anak yang tadinya putus sekolah ataupun tidak sekolah karena kurangnya kesadaran masyarakat mulai dari SD-SMP itu akan diambil kemudian di sekolahkan kembali.

Selanjutnya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia telah direalisasikan melalui ragam program atau kegiatan, serta aksi di masyarakat yang salah satu wadahnya adalah PKK untuk memberdayakan perempuan dan mengejar kemajuan laki-laki atau dengan *prinsip no one left behind*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat diketahui bahwasanya PKK sudah menjadi wadah yang tepat untuk tercapainya

kesetaraan gender di desa Riwang. Karena adanya PKK, perempuan saat ini di Desa Riwang selalu diikuti dalam kegiatan rapat dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi korban ketidakadilan gender di desa Riwang, hal tersebut sejalan dengan pendapat Gheaus, yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapatkan perlakuan keadilan, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti ia korban ketidakadilan gender.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu). Dapat disimpulkan bahwa:

1. Terlaksananya sebuah program kerja tak pernah lepas dari faktor penghambat maupun pendukung, untuk itu ada beberapa faktor pendukung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menjalankan program kerjanya yakni: dari POKJA II yang mempunyai ruang lingkup dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi, semangat dari kader PKK dan dukungan dari pemerintah setempat menjadi faktor pendukung PKK dalam menjalankan kegiatan dari POKJA II ini, namun yang menjadi kendala atau hambatan PKK dalam menjalankan proker POKJA II adalah kurangnya dana karena dana PKK hanya bersifat swadaya, dan pemasaran dari hasil kegiatan yang belum maksimal. Selanjutnya dari POKJA III yang memiliki ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang sama halnya dengan POKJA II yang memiliki faktor pendukung yang pertama semangat atau antusias dari kader PKK sendiri dan dukungan dari pemerintah

setempat namun yang menjadi kendala adalah terkendala dalam mengumpulkan prasarana ataupun perlengkapan untuk lomba. Selanjutnya POKJA IV yang memiliki ruang lingkup dan fungsi pada bidang kesehatan memiliki faktor pendukung yaitu kehadiran atau semangat dari masyarakat ketika diadakan penyuluhan dan bekerja sama saat pemasangan pamphlet namun minimnya pemahaman masyarakat terkait stunting walaupun sosialisasi terus dilakukan.

2. Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat berbasis kesetaraan gender di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu memiliki peran yang positif dengan adanya beberapa kegiatan dan bantuan yang diberikan oleh PKK sendiri yaitu dari segi pendapatan dan konsumsi keluarga dimana adanya kegiatan keterampilan yang hampir seluruh pesertanya adalah kaum perempuan, dimana hasilnya dapat menambah penghasilan keluarga dan adanya koperasi yang dibentuk oleh PKK, dari segi fasilitas tempat tinggal yang dimana pemerintah bekerja sama dengan PKK memberikan jamban bagi masyarakat yang membutuhkan, dari segi kesehatan dengan memberikan sosialisasi pendekatan STBM yang sosialisasi tersebut dilakukan oleh kaum perempuan dan dari segi pendidikan melalui bunda PAUD masyarakat selalu diberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait wajib belajar 12 tahun dan perempuan yang melakukan sosialisasi tersebut dan mengadakan program “massikola sule”. Selanjutnya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia telah direalisasikan melalui ragam program atau kegiatan, serta aksi

di masyarakat yang salah satu wadahnya adalah PKK untuk memberdayakan perempuan dan mengejar kemajuan laki-laki atau dengan *prinsip no one left behind*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan bagi Pemerintah desa maupun perempuan yang belum mengikuti program dari PKK serta untuk peneliti selanjutnya:

1. Pemerintah Desa, perlu mengalokasikan tersendiri dana untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) demi kelancaran program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Pengurus PKK Desa Riwang diharapkan senantiasa memberikan motivasi dan mengenalkan PKK kepada masyarakat yang kurang mengetahui terkait PKK.
3. Masyarakat setempat, meningkatkan pemahaman terkait fungsi dari keberadaan PKK.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: Ub Press 2017.
- Asep Hidayat, "Impelementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kesejahteraan," *Jurnal Papatung* Vol.5 No.2(Tahun 2022):
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/624/583>
- Azisah,Siti,Abdillah Mustari,Himayah,Ambo Masse.,*Konstektualisasi Gender,Islam dan Budaya*,Edisi Digital,2020.
- Arno, Abd. Kadir, "*Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan)*," *Jurnal of Islamic Management and Business* 1, No. 1 (2018):45
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dinamis/article/views/451>
- Fitriyaningsih, Putri Dyah Ayu dan Fita Nurotul Faizah, "Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam),"(2020)
<https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/703>
- Hardani et al.,*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.Edisi 1.Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2020.123
- Hartanti, Sri, *Gender dalam Birokrasi Pemerintah*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Indraswari, Risa, Risni Julaeni Yuhan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Kelahiran Pertama di Wilayah Pedesaan Indonesia,"*Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 12, No. 1 (Juni 2017):
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/274/pdf_1
- Jerohmi, Arini "Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga, Studi Deskriptif Analisis pada Petani Kopi di Desa Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah" *Skripsi Sarjana; Prodi Bimbingan Konseling Islam*: Banda Ace, (2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17737/>
- JMK, "Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Bertambahnya Angka Jumlah Penduduk yang Diakibatkan Meledaknya Angka Kelahiran,"(07 Februari 2023) <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/laju-pertumbuhan-penduduk-merupakan-bertambahnya-angka-jumlah-penduduk-yang-diakibatkan-oleh-meledaknya-angka-kelahiran>

- Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023”,
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Kristanto, Vigi Hery *Metodologi Penelitian*, Edisi 1. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Marwing, Anita Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*, Edisi Pertama Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Mirawati, ”Peran PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” (2018)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4677-Full_Text.pdf
- Nurul Qamariah, Dede “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga.” *Jurnal: Cendekiawan Ilmiah* 4, no. 1 (2019),
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>
- Perwujudan Kesetaraan Gender Melalui Gerakan PKK”, 23 Februari 2016.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/287/perwujudan-kesetaraan-gender-melalui-gerakan-pkk>
- Prasetyaningtyas Pita, ”Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* VOL 6, no. 1 (2018):4
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4330/3819>
- Purwaningsih, Elsa ”Perspektif Kesetaraan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah, (2021):7. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19248FullText.pdf>
- Ramadani, Dwi Muhammad “Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Nukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur” *Journal Ilmu Pemerintahan* 8,3 (2020):677-690
[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2020/12/JURNAL%20DWI%20\(12-12-20-09-56-12\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2020/12/JURNAL%20DWI%20(12-12-20-09-56-12).pdf)
- Sibarani, Dina Debora “Analisis Program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam Upaya Meningkatkan Sosial Ekonomi Keluarga Prasejahtera di Desa Gasaribu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba,” (2022)
[3.http://digilib.unimed.ac.id/49188/1/1.%20NIM.%203182131009%20COVER.pdf](http://digilib.unimed.ac.id/49188/1/1.%20NIM.%203182131009%20COVER.pdf)

- Sidik, Umar, Miftachul Choiri dan Anwar Mujahidin. “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang pendidikan,*” Cet. 1. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sudirman, Faturrahman, Fera Try Susilawati, “Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Publicuho* Vol. 5 No. 4 (Januari 2022)
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, Edisi III (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Tsabit, Ahmad Majdi, “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019)
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/920>
- Widiastuty, Isti, “Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup di Jawa Barat” *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 14 No. 2 (Desember 2019)
<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/377/pdf>.
- You, Yanuarius, *Gender Feminisme dan Fungsionalisme Struktural*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- You Yanuarius “Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua.” *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 21, no. 1 (2019),
<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/19335> .
- Zulham, Arhem. *Pemberdayaan Perempuan dan Kematangan Gender Kelompok Usaha Perikanan*, Cetakan 1. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang?
2. Apakah tujuan berdirinya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang?
3. Berapa jumlah pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang?
4. Bagaimana struktur organisasi dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?
5. Apa saja yang menjadi program kerja dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?
6. Apa saja program kerja yang rutin dilaksanakan tanpa hambatan?
7. Apa saja program kerja yang terkendala?
8. Apa saja program kerja yang tidak pernah dilaksanakan?
9. Apakah pemerintah setempat ikut berkontribusi dalam membantu PKK?
10. Kontribusi seperti apa yang diberikan pemerintah setempat kepada PKK sehingga mampu menjalankan perannya? Apakah dari segi pemikiran, dana, ataupun waktu?
11. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi PKK dalam menjalankan program kerjanya?
12. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut?
13. Apa saja dampak yang diterima selama adanya PKK di desa bapak/ibu?
14. Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan pendapatan dan konsumsi keluarga?
15. Adakah peran PKK dalam hal fasilitas tempat tinggal?
16. Bagaimana peran PKK dari segi kesehatan masyarakat?
17. Bagaimana peran PKK dalam segi pendidikan?

18. Apa kontribusi PKK ini sendiri dalam pelaksanaan pendidikan di desa bapak/ibu?
19. Sejauh mana pengetahuan bapak/ibu terkait kesetaraan gender?
20. Menurut bapak/ibu apakah PKK ini sudah menjadi wadah yang tepat untuk terciptanya kesetaraan gender di desa ini?



Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Karsing, S.AP selaku kepala Desa Riwang dan Penasehat PKK



Dokumentasi dengan ibu Nurwaliah selaku ketua TP PKK Desa Riwang



Wawancara dengan ibu Ernayanti selaku ketua Pokja 1 PKK Desa Riwang



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Drs. Muhammad Ishak selaku badan penyantun dan anggota Pokja II bidang pendidikan PKK Desa Riwang



Dokumentasi wawancara dengan beberapa anggota PKK Desa Riwang



Wawancara dengan ibu Wahida,S.Pd. selaku ketua Pokja II PKK Desa Riwang



Wawancara dengan ibu Nurkhatimah selaku ketua Pokja III PKK Desa Riwang

Lampiran 3: Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Karsing S. AP.*
Jabatan : *kepala Desa Riwang*
Alamat : *Dusun Riwang*

Menerangkan bahwa

Nama : Nurul Lasmi
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester : VIII (delapan)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul **"Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Desa Riwang Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)** pada tanggal

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Riwang, *21* Juli 2023

Karsing, S. AP

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daring Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 407/PENELITIAN/02.10/DPMPTSP/VII/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada
Yth. Ka. Desa Riwang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : B 367/n.19/FEBI.04/KS.02/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Lasmi
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 16 April 2001
Nim : 1904010027
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. KHM.Razak LR. 2
Kelurahan Binturu
Kecamatan Wara Selatan

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS KESEJAHTERAAN GENDER STUDI KASUS PADA RIWANG KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA RIWANG**, pada tanggal 21 Juli 2023 s/d 21 Agustus 2023

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 4 0 9



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 21 Juli 2023
Kepala Dinas


Drs. ANDRASEO TENRIESA, MPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19661231 199203 1 091

Tambuan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurul Lasmi;
5. Arsip.

Lampiran 5: SK Penguji dan Pembimbing

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 141 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Lasmi
NIM : 19 0401 0027
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Perspektif Kesehatan Gender terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kelompok PKK Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu)**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- | | |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Takdir, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. |
| Pembimbing | : Nur Amal Mas, S.E., M.EI. |
| Penguji Utama (I) | : Dr. Fasiha, M.EI. |
| Pembantu Penguji (II) | : Rismayanti, M.Si. |

Palopo, 03 Maret 2023

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Lampiran 6: Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender. Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Lasmi
NIM : 1904010027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing


Nur Amal Mas, S.E.Sy.,M.E.

Tanggal: September 2023

Lampiran 7: Nota Dinas Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

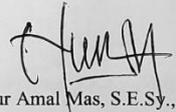
Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender. Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Lasmi
NIM : 1904010027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing


Nur Amal Mas, S.E.Sy.,M.E.

Tanggal: September 2023

Lampiran 8: Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender yang ditulis oleh Nurul Lasmi NIM 1904010027, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 bertepatan dengan 7 Safar 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal:
2. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. ()
Sekretaris Sidang/penguji tanggal:
3. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. ()
Penguji I tanggal:
4. Rismayanti,S.E.,M.Si. ()
Penguji II tanggal:
5. Nur Amal Mas, S.E.Sy.,M.E. ()
Pembimbing tanggal:

Lampiran 9: Nota Dinas Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Mendukung Falah Berbasis Kesetaraan Gender yang ditulis oleh Nurul Lasmi NIM 1904010027, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 bertepatan dengan 7 Safar 1445 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal:
2. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. ()
Sekretaris Sidang/penguji tanggal:
3. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. ()
Penguji I tanggal:
4. Rismayanti,S.E.,M.Si. ()
Penguji II tanggal:
5. Nur Amal Mas, S.E.Sy.,M.E. ()
Pembimbing tanggal:

Lampiran 10: Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B 304 /In.19/FEBI.04/KS.02/EKS/08/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Nurul Lasmi

NIM : 1904010027

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2023

Prodi Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.
NIP. 19800715 201908 1 001

Lampiran 11 : Sertifikat Mahad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/UPT/MA'HAD AL-JAMI'AH/SL /VII/2020

Diberikan kepada :

NURUL LASMI
NIM : 19 0401 0027

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh



Ketua IAIN Palopo
Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004



Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo
Dr. Mardhi Takwim, M.HI
NIP. 19680503 199803 1 005



Lampiran 12 : Surat Keterangan MBTA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Biti Telp (0471)22076 Balandai - Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

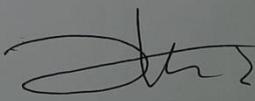
Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan ~~kurang/baik/laenar~~ *coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Nurul Lasmi
NIM : 19 0401 0027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2023

Mengetahui:

Ketua Prodi Ekonomi Syariah	Dosen Penguji
 Dr. Fasiha, S.E.I., M.El. NIP. 19810213 200604 2 002	 Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. NIDN. 0928047703

catatan
- Perhatikan panjang rental, dan Huruf = yg
cehns.
- Lebih menulis Arab.

Lampiran 13: Sertifikat PBAK



Lampiran 14: Hasil Cek Plagiasi

PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA RIWANG DALAM MENDUKUNG FALAH BERBASIS KESETARAAN GENDER 1/3

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	1%
6	almaiyyah.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
8	www.scribd.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
10	core.ac.uk Internet Source	<1%
11	www.kemendiknas.go.id Internet Source	<1%
12	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
14	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
15	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Lasmi, lahir di Palopo pada tanggal 16 April 2001. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Ramli dan ibu Suarni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Ahmad Razak Ir. 2 Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2013 di SDN 47 Tompotikka Kota Palopo. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat pertama SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

contact person penulis: *nurul_lasmi0027_mhs19@iainpalopo.ac.id*